KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 138-152
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13167

Pro dan Kontra Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial: Perspektif Keadilan Sosial Sila Kelima Pancasila

Fazri Miftahul Firdaus[1], Muhamad Raffy Firdaus[2], Muhamad Harya Danang Sutawijaya[3], Ikhsan Ahmad[4]
[1,2,3,4] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*Penulis Korespondensi: 6662240045@student.untirta.ac.id[1], 6662240056@student.unitrta.ac.id[2], 6662240057@student.untirta.ac.id[3], ikhsan@untirta.ac.id[4]

Abstract. *The Free Nutritious Meals (MBG) program launched by the government in early 2025 is a strategic policy to fulfill the right to nutritious food and reduce stunting, in line with the spirit of the Fifth Principle of Pancasila on social justice for all Indonesian people. However, its implementation has given rise to intense pros and cons on social media, encompassing appreciation for the program's benefits as well as criticism regarding food quality and safety, distribution inequality, budget transparency, and targeting accuracy. This study aims to analyze the representation of pro and con discourse on MBG on social media and to interpret its connection with the value of social justice of the Fifth Principle, particularly through the indicators of equitable benefit distribution, targeting accuracy, protection of vulnerable groups, and fairness in resource allocation. The method used is descriptive qualitative with content analysis techniques on purposively selected social media content (videos, images, text, and comments), complemented by triangulation with secondary sources in the form of journals and official documents. The results show that positive sentiment tends to dominate through narratives of nutritional benefits, employment opportunities, and social inclusion, while criticism focuses on health risks, service sustainability, and the use of public budgets. These two discursive poles reflect the dialectic between the ideal of social justice and the reality of policy implementation. In conclusion, the success of MBG in realizing social justice cannot be measured merely by the number of beneficiaries or budget absorption, but by the program's ability to deliver benefits that are equitable, high-quality, transparent, and sustainable. Social media serves as a participatory public space that can strengthen oversight and policy improvement.*

Keywords: *Free Nutritious Meals Program, social media, pros and cons, social justice, Fifth Principle of Pancasila.*

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 merupakan kebijakan strategis untuk memenuhi hak atas pangan bergizi dan mengurangi stunting, sejalan dengan semangat Sila Kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, implementasinya memunculkan pro dan kontra yang intens di media sosial, mencakup apresiasi terhadap manfaat program sekaligus kritik terkait kualitas dan keamanan makanan, ketimpangan distribusi, transparansi anggaran, serta ketepatan sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi wacana pro dan kontra terhadap MBG di media sosial serta menginterpretasikan keterkaitannya dengan nilai keadilan sosial Sila Kelima, khususnya melalui indikator pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan alokasi sumber daya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap konten media sosial (video, gambar, teks, dan komentar) yang dipilih secara purposif, dilengkapi triangulasi dengan sumber sekunder berupa jurnal dan dokumen resmi. Hasil menunjukkan bahwa sentimen positif cenderung mendominasi melalui narasi manfaat gizi, kesempatan kerja, dan inklusi sosial, sementara kritik berfokus pada risiko kesehatan, keberlanjutan layanan, dan penggunaan anggaran publik. Kedua kutub wacana tersebut mencerminkan dialektika antara idealitas keadilan sosial dengan realitas pelaksanaan kebijakan. Kesimpulannya, keberhasilan MBG dalam mewujudkan keadilan sosial tidak cukup diukur dari jumlah penerima atau penyerapan anggaran, melainkan dari kemampuan program memberikan manfaat yang merata, berkualitas, transparan, dan berkelanjutan. Media sosial berperan sebagai ruang publik partisipatif yang dapat memperkuat pengawasan dan perbaikan kebijakan.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, media sosial, pro dan kontra, keadilan sosial, Sila Kelima Pancasila.

Naskah Masuk: 10 Oktober 2026; Revisi: 11 Oktober 2026; Diterima: 12 Oktober2026; Terbit: 21 Oktober 2026

1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menegaskan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, menjamin kesetaraan akses terhadap kebutuhan dasar, serta melindungi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks kontemporer, salah satu kebutuhan dasar yang krusial adalah pemenuhan gizi yang memadai, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 merupakan salah satu kebijakan strategis yang secara normatif sejalan dengan semangat Sila Kelima. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mengurangi kesenjangan gizi antarwilayah. Idealnya, MBG menjadi instrumen negara dalam menjamin hak atas pangan dan kesehatan secara merata.

Namun, implementasi program tersebut di lapangan memunculkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat apresiasi publik terhadap niat baik pemerintah dalam hadir memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, muncul berbagai kritik terkait kualitas dan keamanan makanan (termasuk kasus keracunan massal), ketimpangan sebaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), persoalan transparansi anggaran, potensi korupsi, serta ketidakmerataan sasaran. Dinamika pro dan kontra tersebut tidak hanya berlangsung di ruang publik konvensional, tetapi justru semakin intens dan terfragmentasi di media sosial.

Media sosial telah menjadi arena utama pembentukan dan pertarungan opini publik di era digital. Platform seperti X (Twitter), TikTok, Instagram, dan Facebook memungkinkan warga menyampaikan dukungan, kritik, sarkasme, maupun harapan secara cepat, masif, dan saling terhubung. Sentimen publik terhadap MBG di media sosial cenderung bercampur antara netral, positif, dan negatif, dengan isu kualitas makanan, keracunan, dan tata kelola menjadi pemicu utama kritik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak lagi hanya dinilai berdasarkan dokumen resmi atau

pernyataan pejabat, melainkan melalui pengalaman konkret warga yang diartikulasikan secara digital.

Dalam perspektif etika Pancasila, khususnya Sila Kelima, pro dan kontra di media sosial bukan sekadar ekspresi opini, melainkan cerminan dialektika antara idealitas keadilan sosial dengan realitas implementasi kebijakan. Keadilan sosial tidak hanya berarti distribusi material (makanan gratis), tetapi juga mencakup kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak atas kesehatan dan pangan yang aman, akuntabilitas penyelenggara, serta penghormatan terhadap partisipasi warga dalam mengawasi kebijakan. Ketika pelaksanaan program menimbulkan risiko kesehatan, ketimpangan akses, atau minimnya transparansi, maka muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana MBG benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji representasi pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis di media sosial melalui perspektif keadilan sosial Sila Kelima Pancasila. Analisis ini diharapkan tidak hanya memetakan wacana digital, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Kebijakan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Program ini mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 secara bertahap melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sasaran program mencakup peserta didik, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sebagai kebijakan publik, MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga dengan pemerataan akses pangan bergizi, pengelolaan anggaran, ketepatan sasaran, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program perlu dinilai melalui manfaat yang diterima masyarakat serta kualitas dan pemerataan pelaksanaannya.

Kiftiyah et al. (2025), dalam penelitian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan kebijakan.

Dengan demikian, MBG dapat dikaji bukan hanya dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari proses pelaksanaannya. Aspek inilah yang menjadi dasar munculnya dukungan maupun kritik masyarakat terhadap program tersebut.

Media Sosial sebagai Ruang Pembentukan Opini Publik

Media sosial merupakan ruang komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai persoalan publik. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan X, masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan pemerintah melalui unggahan, video, komentar, dan bentuk interaksi lainnya.

Setiawan (2024), dalam artikel Peran Media Sosial sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas, menjelaskan bahwa media sosial memiliki potensi menjadi ruang publik politik karena sifatnya yang partisipatif. Media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengawasi pemerintah melalui pertukaran pendapat. Namun, potensi tersebut juga membutuhkan literasi digital agar diskusi berlangsung secara kritis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks MBG, media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, harapan, dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan. Informasi mengenai manfaat program dapat membentuk dukungan publik, sedangkan konten mengenai persoalan pelaksanaan dapat memunculkan pertanyaan dan penolakan.

Pamela dan Syas (2026), melalui penelitian Komunikasi Pemerintah dan Fragmentasi Opini Publik di Media Sosial: Kasus Program Makan Bergizi Gratis, menemukan bahwa pesan kebijakan pemerintah dapat ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat. Perbedaan opini tersebut dipengaruhi oleh pengalaman lokal, emosi, dan persepsi terhadap pelaksanaan program.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi tempat terbentuknya beragam penafsiran terhadap kebijakan publik. Oleh sebab itu, opini mengenai MBG perlu dikaji berdasarkan isi pesan, alasan yang disampaikan, dan konteks pembahasannya.

Pro dan Kontra Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial

Pro dan kontra merupakan bentuk perbedaan pandangan masyarakat dalam menilai suatu kebijakan. Perbedaan ini dapat muncul karena masyarakat memiliki pengalaman, kebutuhan, kepentingan, dan penilaian yang berbeda terhadap manfaat maupun konsekuensi suatu program.

Dalam pembahasan MBG, pandangan yang mendukung dapat dikaitkan dengan harapan terhadap peningkatan asupan gizi, perluasan akses terhadap makanan bergizi, serta pengurangan beban pengeluaran keluarga. Sementara itu, pandangan yang mengkritik dapat berfokus pada ketepatan sasaran, pemerataan distribusi, kualitas dan keamanan makanan, transparansi anggaran, serta prioritas penggunaan sumber daya publik.

Penelitian Maulana et al. (2026) mengenai implementasi MBG sebagai bentuk keadilan sosial mengidentifikasi potensi program dalam memperluas akses makanan sehat dan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Penelitian yang sama juga menyoroti tantangan berupa besarnya biaya, distribusi yang belum merata, serta persoalan kelayakan makanan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tentang MBG dapat berkaitan dengan perbedaan penilaian atas tujuan kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Meskipun demikian, tidak semua dukungan atau kritik di media sosial dapat langsung dianggap sebagai gambaran kondisi masyarakat secara keseluruhan. Setiap konten perlu dinilai berdasarkan konteks, argumentasi, dan bukti yang menyertainya.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pro dan kontra MBG perlu menganalisis bagaimana masyarakat membangun argumentasi, menyampaikan penilaian, dan menggunakan nilai tertentu untuk mendukung atau mengkritik program. Analisis ini dapat membantu menjelaskan bagaimana opini publik terhadap suatu kebijakan terbentuk dan berkembang di ruang digital.

Landasan Teori Utama: Keadilan Sosial Sila Kelima Pancasila

Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi landasan utama untuk menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keadilan sosial menekankan pemerataan kesejahteraan, pemenuhan hak masyarakat, serta distribusi manfaat kebijakan yang adil dan sesuai kebutuhan.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan konsep keadilan distributif John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971). Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Konsep ini relevan untuk menilai apakah pelaksanaan MBG telah memperhatikan masyarakat yang membutuhkan serta menjamin pemerataan akses terhadap makanan bergizi.

Dalam penelitian ini, keadilan sosial dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu:

1. Pemerataan manfaat, yaitu distribusi manfaat program kepada masyarakat.
2. Ketepatan sasaran, yaitu kesesuaian penerima manfaat dengan kebutuhan masyarakat.
3. Perlindungan kelompok rentan, yaitu perhatian terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
4. Keadilan alokasi sumber daya, yaitu pertimbangan manfaat program, penggunaan anggaran, dan tanggung jawab pemerintah.

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis argumen yang mendukung maupun mengkritik MBG di media sosial. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengidentifikasi opini pro dan kontra, tetapi juga mengkaji bagaimana masing-masing opini mencerminkan nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila.

Teori Pendukung: Ruang Publik Jürgen Habermas

Teori ruang publik Jürgen Habermas digunakan untuk menjelaskan media sosial sebagai ruang pertukaran informasi, pendapat, dan kritik mengenai kebijakan publik. Menurut perspektif ini, ruang publik memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta mengawasi tindakan pemerintah melalui diskusi dan argumentasi (Setiawan, 2024).

Dalam konteks MBG, media sosial menjadi tempat masyarakat menyampaikan dukungan dan kritik berdasarkan pengalaman, informasi, serta penilaian terhadap pelaksanaan program. Teori ini membantu peneliti memahami bagaimana opini pro dan kontra terbentuk dan dipertukarkan di ruang digital.

Teori ruang publik digunakan sebagai teori pendukung, sedangkan sila kelima Pancasila dan konsep keadilan distributif Rawls menjadi landasan untuk menilai substansi argumen mengenai pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini adalah sebagai berikut.

1. Kiftiyah et al. (2025)

Penelitian mengenai MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Fokus utamanya adalah ketepatan sasaran, pemerataan kesejahteraan, dan tantangan pelaksanaan program.

Relevansi: menjadi landasan untuk mengkaji MBG dengan perspektif sila kelima Pancasila.

2. Pamela dan Syas (2026)

Penelitian mengenai komunikasi pemerintah dan fragmentasi opini publik menggunakan pendekatan kualitatif, studi dokumen, dan analisis data sekunder media sosial. Kajian ini membahas bagaimana pesan pemerintah ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat.

Relevansi: memberikan landasan untuk memahami opini pro dan kontra terhadap MBG di media sosial.

3. Setiawan (2024)

Penelitian mengenai media sosial sebagai ruang publik melalui perspektif Jürgen Habermas membahas potensi media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi, pertukaran pendapat, dan pengawasan pemerintah.

Relevansi: memberikan landasan konseptual untuk memahami media sosial sebagai ruang diskusi kebijakan publik.

4. Tamba et al. (2024)

Penelitian mengenai Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial membahas peran nilai Pancasila dalam membentuk kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Relevansi: memperkuat landasan teori untuk menganalisis MBG berdasarkan keadilan sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai MBG telah membahas keadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan, perbedaan opini publik di media sosial, dan kedudukan media sosial sebagai ruang publik. Penelitian ini menempatkan ketiga aspek tersebut dalam satu pembahasan dengan berfokus pada bagaimana konten yang

mendukung dan mengkritik MBG merepresentasikan nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila.

Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk dukungan dan kritik, tetapi juga menelaah alasan yang mendasari pandangan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip pemerataan dan kesejahteraan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif** dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk memahami isi pesan, argumentasi, serta pandangan pro dan kontra terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial berdasarkan perspektif keadilan sosial sila kelima Pancasila.

Objek dan Sumber Data

Objek penelitian adalah konten media sosial yang membahas dukungan dan kritik terhadap program MBG. Data primer diperoleh dari unggahan publik berupa video, gambar, teks, dan komentar yang relevan. Data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan MBG dan keadilan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi konten media sosial. Konten dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan pandangan pro, kontra, atau campuran.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isi dan argumentasi setiap konten, lalu mengelompokkannya berdasarkan empat indikator keadilan sosial, yaitu:

1. Pemerataan manfaat.
2. Ketepatan sasaran.
3. Perlindungan kelompok rentan.
4. Keadilan alokasi sumber daya.

Selanjutnya, argumentasi dan bukti dalam setiap konten dianalisis berdasarkan nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila. Posisi pro atau kontra tidak langsung dianggap adil atau tidak adil, tetapi dinilai berdasarkan isi dan alasan yang disampaikan.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dalam konten media sosial dengan jurnal ilmiah dan dokumen resmi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa pembahasan memiliki dasar informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pro dan Kontra Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial



Gambar 1. Reaksi Positif Pada Aplikasi Tiktok

Menurut temuan yang ditemukan melalui pengawasan percakapan publik di media sosial, tanggapan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) umumnya positif. Mengungguli perasaan negatif. Perasaan positif biasanya berasal dari unggahan akun yang mendukung pelaksanaan program MBG, baik dari akun resmi maupun tidak resmi serta masyarakat umum. Dalam kebanyakan kasus, proses distribusi disertakan dalam konten yang diunggah. Makanan, aktivitas yang dilakukan siswa saat menerima makanan, dan upaya untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Salah satu ilustrasi terlihat pada unggahan di situs web TikTok yang menyoroti bahwa program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan mendukung inklusi sosial bagi orang-orang dengan disabilitas. Kisah ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat setuju.

Salah satu contoh terlihat pada unggahan platform TikTok yang menyoroti abhwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendukung inklusi sosial bagi kelompok disabilitas. Narasi seperti ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat memandang program MBG sebagai kebijakan yang memberikan manfaat sosial secara lebih luas.



Gambar 2. Reaksi Negatif Pada Aplikasi X

Di sisi lain, sentimen negatif umumnya muncul dari masyarakat yang menyoroti kualitas implementasi program, khususnya terkait isu kebersihan dan keamanan makanan. Percakapan negatif yang muncul juga mengenai penggunaan anggaran program yang dianggap kurang tepat sasaran oleh sebagian masyarakat, terlihat pada salah satu unggahan di platform X. Hal ini membuat munculnya pandangan negatif dari masyarakat menganai kebijakan dan cara anggaran publik digunakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sentimen positif masih mendominasi, sentimen negatif masih dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat jika tidak direspons dengan cepat dan tepat. Jika dikaitkan dengan konsep komunikasi krisis, masalah yang berkaitan dengan anggaran dan keamanan pangan memang sensitif di media sosial karena mudah memicu perasaan emosional dan diskusi di kalangan masyarakat. Selain itu, sifat media sosial yang cepat menyebar membuat persepsi negatif lebih mudah tersebar, terutama dengan konten viral.

Analisis Konten Berdasarkan Indikator Keadilan Sosial

a. Pemerataan Manfaat

Pemerataan manfaat berkaitan dengan sejauh mana program MBG dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan makanan bergizi. Dukungan terhadap program dapat didasarkan pada harapan bahwa penyediaan makanan bergizi mampu memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Sebaliknya, kritik dapat muncul ketika pelaksanaannya dinilai belum merata atau terdapat wilayah yang belum menerima layanan secara optimal.

Ditinjau dari sila kelima Pancasila dan konsep keadilan distributif John Rawls, pemerataan tidak cukup dinilai dari luasnya cakupan program secara nasional. Analisis juga perlu memperhatikan apakah masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses memperoleh manfaat yang memadai. Oleh karena itu, konten yang membahas

ketimpangan distribusi perlu diperiksa berdasarkan lokasi, kondisi penerima, serta bukti yang mendukung argumennya.

b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian penerima manfaat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks MBG, indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis pendapat yang mempertanyakan apakah program telah menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Konten yang mendukung MBG dapat menekankan pentingnya penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok sasaran lainnya. Sementara itu, konten yang mengkritik dapat mempertanyakan kesesuaian distribusi dengan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.

Dari perspektif keadilan distributif Rawls, kebijakan sosial perlu memperhatikan posisi kelompok yang kurang beruntung. Artinya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya penerima, tetapi juga melalui kesesuaian manfaat dengan kebutuhan. Argumen mengenai ketepatan sasaran perlu didukung data atau informasi yang relevan agar tidak hanya didasarkan pada asumsi pribadi.

Dengan demikian, baik dukungan maupun kritik terhadap MBG dapat mencerminkan perhatian terhadap keadilan sosial. Penilaiannya bergantung pada alasan, bukti, dan persoalan yang disampaikan dalam konten tersebut.

c. Perlindungan Kelompok Rentan

Perlindungan kelompok rentan berkaitan dengan perhatian kebijakan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Dalam pelaksanaan MBG, aspek ini relevan dengan kondisi anak-anak, keluarga kurang mampu, serta masyarakat di wilayah dengan akses pangan dan layanan yang terbatas.

Dukungan terhadap MBG dapat menunjukkan harapan bahwa program membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima. Sebaliknya, kritik dapat menyoroti apakah makanan yang diberikan sesuai kebutuhan gizi, memiliki kualitas yang layak, dan dapat diakses oleh kelompok sasaran secara konsisten.

Dalam perspektif sila kelima Pancasila, perhatian terhadap kelompok rentan merupakan bagian penting dari keadilan sosial. Oleh sebab itu, konten yang menuntut perbaikan kualitas makanan atau perlindungan penerima manfaat tidak otomatis

menunjukkan penolakan terhadap tujuan program. Kritik semacam itu dapat mencerminkan tuntutan agar pelaksanaannya semakin adil dan bertanggung jawab.

d. Keadilan Alokasi Sumber Daya

Keadilan alokasi sumber daya berkaitan dengan penggunaan anggaran dan sumber daya publik untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks MBG, pembahasan dapat mencakup transparansi anggaran, efisiensi pelaksanaan, pengawasan pengadaan makanan, dan pertimbangan terhadap kebutuhan publik lainnya.

Menurut laporan ANTARA pada 8 Januari 2026, realisasi anggaran MBG sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu Rp71 triliun. Pada akhir tahun tersebut, jumlah penerima manfaat yang dilaporkan mencapai 56,13 juta dari target 82,9 juta penerima.

Data tersebut memberikan konteks untuk memahami mengapa penggunaan anggaran dan pencapaian target dapat menjadi bahan perdebatan publik. Namun, angka penyerapan anggaran dan jumlah penerima saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa program berjalan adil atau tidak adil. Penilaian perlu mempertimbangkan efektivitas belanja, kualitas makanan, pemerataan layanan, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, konten yang mempertanyakan alokasi anggaran perlu dianalisis berdasarkan argumentasi dan bukti yang digunakan. Kritik yang disertai informasi relevan dapat menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap kebijakan, sedangkan pendapat yang hanya membandingkan anggaran tanpa konteks belum cukup untuk menyimpulkan terjadinya ketidakadilan.

Tantangan Yang Akan Terjadi Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Keadilan Sosial di Sekolah

Implementasi program makan bergizi gratis pada seluruh sekolah di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang berpotensi mengikis prinsip keadilan sosial jika tidak dikelola secara komprehensif.

a. Transparansi Anggaran dan Keberlanjutan Pelayanan

Tantangan lainnya adalah memastikan penggunaan anggaran transparan serta pelayanan berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan dasbor MBG Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, pada Desember 2025 terdapat SPPG yang diberhentikan sementara karena belum menerima pencairan dana dari pusat.

Penghentian tersebut berdampak pada 22 sekolah dasar dengan 3.408 siswa, selain kelompok penerima manfaat lainnya.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan layanan yang diterima siswa. Selain itu, konsistensi pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi diperlukan agar penggunaan sumber daya publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif keadilan sosial, alokasi anggaran perlu mendukung distribusi manfaat yang adil dan berkesinambungan. Evaluasi penggunaan anggaran juga perlu mempertimbangkan kualitas makanan, jumlah penerima yang terlayani, serta dampak program terhadap kesejahteraan siswa.

b. Kesiapan Sekolah dan Keterlibatan Masyarakat

Kesiapan setiap sekolah dalam menerima dan mengelola distribusi MBG juga perlu diperhatikan. Koordinasi antara pengelola SPPG, pihak sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat dibutuhkan untuk memastikan makanan diterima, dibagikan, dan dikonsumsi dengan baik. Sekolah juga perlu memperhatikan kebutuhan siswa serta pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Dasbor MBG Kementerian Keuangan Provinsi Banten mencatat perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program, dialog yang mempertimbangkan konteks budaya lokal, serta penyediaan fasilitas pemilahan sampah di sekolah dan SPPG.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mengurangi kesempatan orang tua dan pihak sekolah untuk menyampaikan kebutuhan serta mengevaluasi pelaksanaan program. Padahal, partisipasi publik dapat membantu memastikan bahwa pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.

Dalam perspektif sila kelima Pancasila, pelibatan masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan kebijakan yang adil dan memperhatikan kepentingan bersama. Pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa, kondisi lingkungan sekolah, dan karakteristik masyarakat setempat.

5. KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemerataan distribusi makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, pengawasan, serta transparansi penggunaan anggaran. Berbagai persoalan tersebut memunculkan pro dan kontra di media sosial yang mencerminkan perbedaan pandangan masyarakat dalam menilai manfaat dan pelaksanaan program.

Ditinjau dari perspektif keadilan sosial sila kelima Pancasila, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Program ini juga perlu memastikan bahwa seluruh penerima memperoleh akses yang adil terhadap makanan bergizi, terutama kelompok yang membutuhkan. Empat indikator, yaitu pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan alokasi sumber daya, dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan MBG mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Media sosial memiliki peran penting sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan, kritik, pengalaman, dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pendapat pro maupun kontra tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti bahwa suatu kebijakan telah adil atau tidak adil. Setiap konten perlu dianalisis berdasarkan argumentasi, bukti, serta persoalan keadilan yang disampaikan. Kritik terhadap pelaksanaan program, misalnya, dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui pengawasan yang baik serta evaluasi secara berkala. Pemerintah juga perlu memperhatikan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan. Pada akhirnya, keberhasilan MBG dalam mewujudkan keadilan sosial tidak hanya terletak pada tujuan program, tetapi juga pada kemampuannya memberikan manfaat yang nyata, merata, dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara tersebut, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga bentuk nyata penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726

Maulana, F. A., Fauzan, M. D., & Amalia, R. N. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud keadilan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 15(1), 112–123. https://doi.org/10.33061/t4kmpv43

Pamela, S., & Syas, M. (2026). Komunikasi pemerintah dan fragmentasi opini publik di media sosial: Kasus Program Makan Bergizi Gratis. Khazanah Multidisiplin, 7(1). https://doi.org/10.15575/kl.v7i1.54253

Setiawan, F. X. R. (2024). Peran media sosial sebagai ruang publik: Tinjauan filosofis gagasan ruang publik Jürgen Habermas. MELINTAS, 39(3). https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826

Tamba, W. P., Felani Budi Hartanto, M., & Yunia Putri, P. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 4(2), 146–162. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573

Azzahra, M. S., Nursanti, S., & Arindawati, W. A. (2025). Analisis framing pemberitaan pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 12(2), 775–788. https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.9862

Effendi, M. R. (2025). Proses diskursus di ruang publik, analisis kualitas opini publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. Repositori Universitas Gadjah Mada.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Sianturi, H. R. R. P. (2025). Politics on a plate: Equivocal communication in Indonesian presidential nutrition policy. Frontiers in Communication, 10. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1612652

Yuniarti, T., & Andriza, B. (2026). Analisis sentimen dan opini publik: Evaluasi komunikasi media sosial Instagram Tim Kepresidenan @PCO.RI dalam menangani kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, 11(1). https://doi.org/10.52423/jikuho.v11i1.1982

ANTARA News. (2026, 8 Januari). Anggaran MBG 2025 ternyata hanya terserap 72,5 persen dari pagu.